

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Semester I Tahun 2024



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

# **DAFTAR ISI**

LAPORA	AN_PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	1
DAFTAF	R ISI	i
BAB I_PI	ENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3	Maksud dan Tujuan	2
BAB II_P	PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1	Pelaksana SKM	4
2.2	Metode Pengumpulan Data	4
2.3	Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4	Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5	Penentuan Jumlah Responden	5
BAB III <u> </u> I	HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1	Jumlah Responden SKM	7
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	ANALISIS HASIL SKM	10
3.1	Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
3.2	Rencana Tindak Lanjut	11
3.3	Tren Nilai SKM	12
BAB V_K	(ESIMPULAN	13
LAMPIR	RAN	14
1.	Kuesioner	14
2	Hasil Olah Data SKM	15

### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai salah satu penyedia layanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas



1

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

## 1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
  Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi dan perijinan yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
- 5. Sebagai pedoman penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh pada periode berikutnya.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;



- 4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaanpelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

### **BAB II**

### **PENGUMPULAN DATA SKM**

#### 2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

## 2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online melalui kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu:

- 1. **Persyaratan**: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. **Sistem, mekanisme dan prosedur**: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3. **Waktu penyelesaian**: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. **Biaya/ tarif**: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan**: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.



- 8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9. **Sarana dan prasarana**: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yangmerupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

## 2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### 2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 (enam) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2024	6
2.	Pengumpulan Data	Januari-Juni 2024	182
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli 2024	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2024	5

### 2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Jumlah populasi penerima layanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selama satu periode mulai Januari-Juni 2024 adalah sebanyak 2400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi



<sup>5</sup> 

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 331 orang.

Populasi (N)	ulasi (N) Sampel (n)		lasi (N) Sampel (n) Populasi S (N)		Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10 220	- Andrew Comment	140	1200	291		
15	Market State of the State of th		144	1300	297		
20	19	240	148	1400	302		
25	24	250	152	1500	306		
30	28	260	155	1600	310		
35	32	270	159	1700	313		
40	36	280	162	1800	317		
45	40	290	165	1900	320		
50	44	300	169	2000	322		
55	48	320	175	2200	327		
60	52	340	181	2400	331		
65	56	360	186	2600	335		
70	59	380	191	2800	338		
75	63	400	196	3000	341		
80	66	420	201	3500	346		
85	70	440	205	4000	351		
90	73	460	210	4500	354		
95	76	480	214	5000	357		
100	80	500	217	6000	361		
110	86	550	226	7000	364		
120	92	600	234	8000	367		
130	97	650	242	9000	368		
140	103	700	248	10000	370		
150	108	750	254	15000	375		
160	113	800	260	20000	377		
170	118	850	265	30000	379		
180	123	900	269	40000	380		
190	127	950	274	50000	381		
200	132	1000	278	75000	382		
210	136	1100	285	1000000	384		

# **BAB III**

# HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

# 3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 331 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	74	22,36%
		PEREMPUAN	257	77,64%
2	PENDIDIKAN	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	83	25,08%
		DIII/S1	214	64,65%
		S-2	32	9,67%
		S-3	2	0,6%
3	PEKERJAAN	PNS	37	11.18%
		TNI	0	0%
		POLRI	0	0%
		WIRASWASTA	33	9.97%
		SWASTA	45	13.6%
		LAINNYA	216	65,26%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN PENDAMPINGAN MAHASISWA/SISWA PKL	38	11,49%
		LAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN PKL	55	16,62%
		LAYANAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN MITRA	21	6,34%
		LAYANAN PERMINTAAN DATA DAN PENERBITAN SURAT IJIN PENELITIAN	58	17,52%



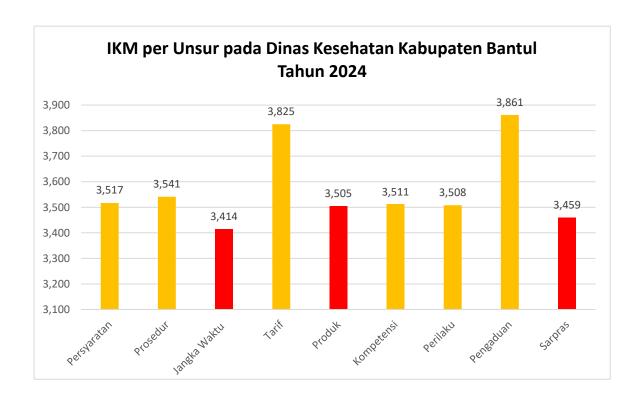
<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

LAYANAN SERTIFIKAT PKP SIAP SAJI	46	13,90%
LAYANAN SERTIFIKAT PKP-IRT	113	34,13%

# 3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,517	3,541	3,414	3,825	3,505	3,511	3,508	3,861	3,459
Kategori	SB	SB	В	SB	SB	SB	SB	SB	В
IKM Unit Layanan		89,27 (SANGAT BAIK)							





<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

#### **BAB IV**

## **ANALISIS HASIL SKM**

## 4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- Jangka waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah yaitu 3,414. Selanjutnya sarana prasarana mendapatkan nilai 3,459 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga produk spesifikasi jenis layanan mendapatkan nilai 3,505 termasuk nilai terendah ketiga.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan, saran, dan masukan mendapatkan nilai 3,861, biaya/tarif mendapatkan nilai 3,825 adalah nilai tertinggi kedua, untuk nilai tertinggi ketiga yaitu prosedur pelayanan dengan nilai 3,541.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- 1. Efesiensi waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. Mempercepat proses perolehan informasi layanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- 3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang layak.
- 4. Memberikan informasi secara lengkap mengenai produk pelayanan yang tercantum di standar pelayanan pada masyarakat.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pelatihan khusus terkait *service excellent* baru diberikan pada sebagian petugas.
- Belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.
- Kurangnya sosialisasi tentang layanan yang tercantum di standar pelayanan kepada masyarakat.
- Perlu adanya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang kurang layak.



### 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat koordinasi rencana tindak lanjut hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

				Wa	ktu		Penanggung
No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	TW	TW	TW	TW	Jawab
			I	II	Ш	IV	
1.	Jangka waktu	Memberikan pelatihan			٧	٧	Sub. Bag
	penyelesaian	khusus dengan service					Umum
		excellent					
2.	Sarana dan	Memperbaiki sarana			٧	٧	Sub. Bag
	Prasarana	dan prasarana yang kurang layak					Umum
3.	Produk spesifikasi jenis layanan	Memberikan pelatihan khusus terkait service excellent dan pengembangan inovasilayanan			V	V	Sub. Bag Umum

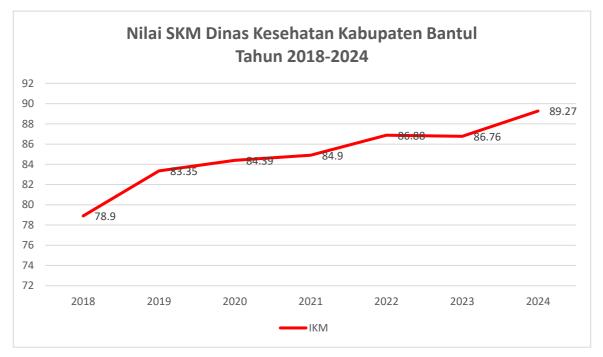


<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>11</sup> 

#### 4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga semester I tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

## **BAB V**

## **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode Januari hingga Juni 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang "Sangat Baik" dengan nilai SKM 89,27.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu jangka waktu penyelesaian, sarana prasarana, dan produk spesifikasi jenis layanan.
- Sedangkan tiga unsur pelayanan dengan nilai tertinggi yaitu penanganan pengaduan, saran, dan masukan, biaya/tarif, serta prosedur pelayanan.

PIh. KEPALA DINAS KESEHATAN,

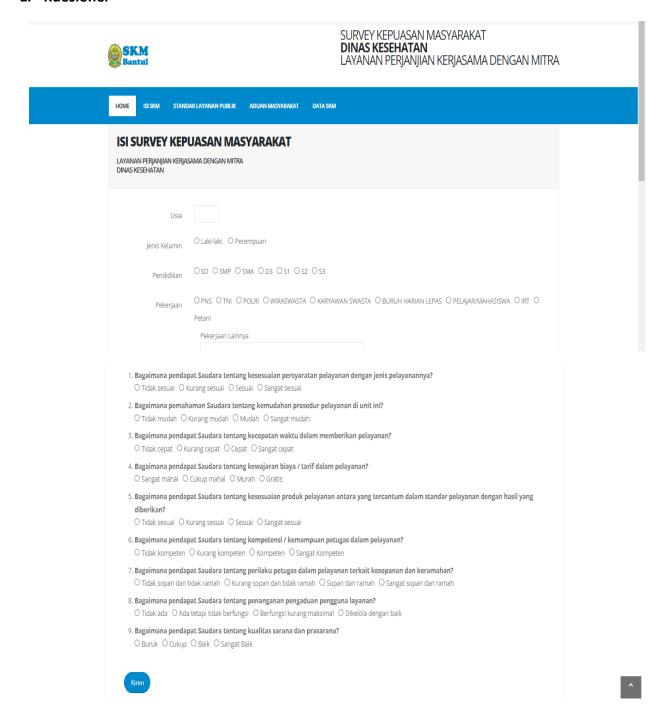


# dr. SRI WAHYU JOKO SANTOSO

Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 197105272005011005

### **LAMPIRAN**

### 1. Kuesioner





Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## 2. Hasil Olah Data SKM

					DAN P	ER U	NSUR	PELA	NAY	AN		
	OPD ALAMAT		: Dinas Kese		ala Danatul	11 1 2 2 2 2	-l <b>T</b> :	84-			Dantul	V
	Tlp/Fax.		: Komplek II : 0274367531		ida Bantui, J	II. LINE	gkar i im	ur, iviar	naing,	Trirenggo	Bantui	, Yogya
No					JR PELAYAN							
Responden 1	U1 2	U2 3	U3 4	5	6	U6 7	U7 8		U8 9	U9 10		
1	4	3	3	4	3	3		3	4			
2	4	3	3	4	4	3		4	4			
3	4	4	4	3	3	3		3	4	3	3	
4	3	3	3	3	4	3		3	4	3	3	
5	4	4	4	4	4	3	_	4	4		-	
6	4	4	3	3	3	3	_	3	4		-	
7	4	4	3	3	4	4		4	4	3		
8	4	4	4	3	4	3	_	3	4		-	
9	3	3	3	3	3	3		3	4	3	_	
11	4	4	4	4	4	3 4	_	4	4		-	
12	4	4	4	3	4	4		3	4		_	
320	4	4	-1	4	4		4		3	4	4	, 
321	4	3	4	4	3		4		4	4	3	
322	4	4		4	4		4		4	3	4	
323	3	3		4	3		3		4	4	3	
324	4	4		4	4		3		4	4	3	
325 326	3	3		4	3		3		3	3	3	
327	4	3		4	3		3		3	4	3	
328	4	3		4	4		3		3	3	4	
329	4	4		4	3		3		4	4	3	
330	3	4	4	4	4		4		4	3	3	
331	3	4	4	4	3		4	;	3	3	4	
Snilai /							_		+			
unsur	1164	1172	1130	1266	1160	1	1162	116	1	1278	1145	
RR / unsur IRR Tertbg	3.517	3.541	3.414	3.825	3.505	3	.511	3.50	8	3.861	3.459	*)
/Unsur	0.391	0.393	0.379	0.425	0.389	0	.390	0.39	0	0.429	0.384	3.5
M Unit pel	ayanan											**)
erangan :					No	o.		UNSUR F	PELAYAN	IAN	NILAI	RATA-RAT
1 s.d. U9		: Unsur-Unsu	ır pelayanan		U	1 Pe	ersyaratan					3.5
RR		: Nilai rata-r			U		osedur					3.5
M		: Indeks Kep	uasan Masyaral	kat	U	3 W	aktu pelaya	ınan				3.4
*)		-	R IKM tertimbar		U	_	aya/tarif					3.8
**)			R Tertimbang x		U	_	oduk layan:	an				3.5
Per Unsur			i per unsur dib		U		mpetensi p		1			3.5
			sioner yang ter		U		erilaku pelal					3.5
tertimbang		: NRR per un			U				an Saran	dan masuka	,	3.8
er unsur		Transper un	341 × 0,11		U		arana dan p		an, ourun	dan masaka		3.4
	INIT DEL AM	ANIANI -		20.27	0.	- 00	ana uan p	aoarand				J.5
	UNIT PELAY	ANAN:		39.27								
Pelayanan :												
(Sangat Baik)		: 88,31 - 100										
(Baik)		: 76,61 - 88,3										
(Kurang Baik)		: 65,00 - 76,6										
(Tidak Baik)		: 25,00 - 64,9	10									



<sup>•</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"